

ISSN 0216-0897

TERAKREDITASI : B
No. 124/AKRED-LIPI/P2MBI/2008

JURNAL

ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

Journal of Forestry Policy Analysis

Vol. 7 No. 2, Agustus 2010

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN



DEPARTEMEN KEHUTANAN

Ministry of Forestry

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Forestry Research and Development Agency

PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

Centre for Forestry Socio Economic and Policy Research

BOGOR INDONESIA

J.Analisis. Keb.Hut	Vol.7	No.2	Hlm. 81 - 168	Bogor Agustus 2010	ISSN 0216-0897
------------------------	-------	------	------------------	-----------------------	-------------------

Vol. 7 No. 2, Agustus 2010

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan memuat karya tulis ilmiah dari hasil penelitian, pemikiran/tinjauan ilmiah mengenai kebijakan kehutanan atau bahan masukan bagi kebijakan kehutanan; terbit secara serial tiap empat bulan; dan telah diakreditasi oleh LIPI (Keputusan Kepala LIPI No. 683/D/2008) dengan **predikat B**.

*Journal of Forestry Policy Analysis is a scientific publication reporting research findings and forestry policy reviews or forestry policy recommendation; published serially every 4 months; and has been accredited by LIPI (decree No. 683/D/2008) as **Good Category (B-grade)**.*

Penanggung jawab (Editorial in chief) : Kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Dewan Redaksi (Editorial Board) :

Ketua (*Chairman*), merangkap anggota
Anggota (*Members*)

- : Prof. Dr. Ir. Djaban Tinambunan, MS
: 1. Dr. Ir. A. Ngaloken Gintings, MS
2. Dr. Ir. Haryatno Dwiprabowo, M.Sc
3. Dr. Syaiful Anwar
4. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS
5. Ir. Ari Wibowo, M.Sc

Sekretariat Redaksi
(Editorial Secretariat) :

Ketua (*Chairman*)

: Kepala Bidang Pelayanan dan Evaluasi Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

Anggota (*Members*)

- : 1. Kepala Sub. Bidang Pelayanan Penelitian
2. Bayu Subekti, SIP., M. Hum
3. Galih Kartika Sari, S.Hut.

Diterbitkan oleh (*Published by*) :

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

(*Centre for Forestry Socio Economic and Policy Research*)

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

(*Forestry Research and Development Agency*)

Alamat (*Address*) : Jalan Gunung Batu No. 5, PO. BOX 272 Bogor 16610, Indonesia

Telepon (*Phone*) : 62-0251-8633944

Fax (*Fax*) : 62-0251-8634924

Email : publikasi_puslitsosek@yahoo.com

ISSN 0216-0897

TERAKREDITASI : B
No. 124/AKRED-LIPI/P2MBI/2008

JURNAL
**ANALISIS KEBIJAKAN
KEHUTANAN**

Journal of Forestry Policy Analysis

Vol. 7 No. 2, Agustus 2010



DEPARTEMEN KEHUTANAN

Ministry of Forestry

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Forestry Research and Development Agency

PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN

Centre for Forestry Socio Economic and Policy Research

BOGOR INDONESIA

J. Analisis Keb. Hut.	Vol. 7	No. 2	Hlm. 81 - 168	Bogor Agustus 2010	ISSN 0216-0897
--------------------------	--------	-------	------------------	-----------------------	-------------------

DAFTAR ISI (CONTENTS)

PERAN PARAPIHAK DALAM PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT; STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN <i>(The Role of Stakeholders in Peat Land Utilization; Case Study at Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra)</i> Edwin Martin & Bondan Winarno	81 - 95
LENDE URA, SEBUAH INISIATIF MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA <i>(Lende Ura, an Initiative in the Community Rehabilitation of Forest and Land Resources in Sumba Barat Daya)</i> Gerson ND. Njurumana & Budiyanto Dwi Prasetyo	97 - 110
PROSPEK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN BIAKNUNFOR, PAPUA <i>(Prospect of Community Forest Development in Biak Nunfor Regency, Papua)</i> Irma Yeni & Sandhi Imam Maulana	111 - 128
KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEM- BANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP <i>(Policy to Determine Incentived form for Developing Privately Owned Forest in Gunung Sawal, Ciamis District with AHP Method)</i> Dian Diniyati & San Afri Awang	129 - 143
KONSEP TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LAHAN PADA MASYARAKAT DAYAK KENYAH DI KALIMANTAN TIMUR <i>(Landscape Concepts and Land Management of Dayak Kenyah Tribe in East Kalimantan)</i> I. Samsuodin, A. Wijaya & H. Sukiman	145 - 168

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

ISSN: 0216 - 0897

Terbit : Agustus 2010

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya.

UDC (OSDCF) 630*114.444 (594.47)
Edwin Martin & Bondan Winarno

Peran Parapihak dalam Pemanfaatan Lahan Gambut;
Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2,
hal. 81 - 95

Rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak, melalui studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Analisis stakeholder dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mendukung aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut digunakan sebagai metode dalam mencari pemungkin terjadinya dukungan parapihak terhadap upaya rehabilitasi. Penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas sebuah jenis usaha adalah faktor pemungkin dominan yang layak diperhatikan agar terjadi aksi kolektif dalam program rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kata kunci: Rehabilitasi lahan gambut, insentif pemungkin, aksi kolektif.

UDC (OSDCF) 630*907.32 (594.71)
Gerson ND. Njurumana & Budiyanto Dwi Prasetyo

Lende Ura, sebuah Inisiatif Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sumba Barat Daya

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2,
hal. 97 - 110

Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan sebaliknya manusia adalah produk dari lingkungan, sehingga berbagai bentuk adaptasi lingkungan banyak dijumpai berdasarkan persepsi dan pengalaman berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Inisiatif lokal pada tataran filosofis maupun praktis, sesungguhnya merupakan modal dasar bagi pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang inisiatif lokal *Lende Ura* yang ada pada masyarakat

Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui pendokumentasian literatur dan wawancara mendalam terkait fokus kajian. Penelitian dilakukan tahun 2009. Analisis data dilakukan secara deskriptif naratif. *Lende Ura* merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal yaitu sebuah filosofi kehidupan masyarakat di Sumba Barat Daya yang memandang hutan sebagai jembatan bagi datangnya hujan. Masyarakat memahami bahwa hutan yang terpelihara dengan baik akan menjadi jembatan bagi turunnya hujan sehingga mendukung usaha pertanian dan ketersediaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep *Lende Ura* mendorong masyarakat menghargai setiap komponen sumberdaya alam yang ada, serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses terjadinya hujan. Karenanya, masyarakat tidak melakukan penebangan liar, menghindari kebakaran hutan dan lahan, memelihara daerah tangkapan air melalui budidaya pertanian campuran lahan kering serta memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Kata kunci: *Lende ura*, inisiatif lokal, rehabilitasi, konservasi tanah dan air, kaliwu.

UDC (OSDCF) 630*923.4 (594.81)
Irma Yeni & Sandhi Imam Maulana

Prospek Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Biak Nunfor, Papua

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2,
hal. 111 - 128

Pembangunan hutan tanaman oleh rakyat (diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pembangunan hutan tanaman rakyat adalah kurangnya minat masyarakat. Untuk mendukung minat masyarakat dan pengusaha local dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat dibutuhkan beberapa hal yaitu : sosialisasi program ditingkat masyarakat sehingga tepat sasaran, kepastian hukum atas status lahan, informasi kelayakan usaha baik secara teknis maupun finansialnya, dan pendampingan kelembagaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi prospek hutan tanaman rakyat yang dapat dikembangkan di Kabupaten Biak Nunfor termasuk manfaat ekonomis yang diterima dengan keberadaan hutan tanaman rakyat tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan teknik survey. Prospek pengembangan hutan rakyat dihitung dengan melihat aspek finansial dan kontribusi kegiatan HTR pada pendapatan petani.

<p>Perhitungan aspek finansial dilakukan dengan mengambil contoh pada hutan rakyat KTH Insumarises Distrik Biak Timur yaitu pendapatan bersih perusahaan hutan dengan menggunakan rumus Faustman, kelayakan finansial dihitung kriteria <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR) dan <i>Internal Rate of Return</i> (IRR) yang dinyatakan dalam satuan persen.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan 1) jika 10% dari hutan produksi di Kabupaten Biak Nunfor merupakan hutan produksi yang tidak produktif maka diperkirakan terdapat 7.477,8 ha yang dapat dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman rakyat dengan jenis unggulan <i>Calophyllum inophyllum</i> dengan menggunakan system silvikultur THPB. 2) Perusahaan HTR layak dilaksanakan dalam daur 50 tahun dengan discount rate 5%. 3) Tingginya curahan hari kerja (5.724 HOK) memberikan dampak pada perluasan lapangan kerja dan tingkat pendapatan petani dari kegiatan tersebut. 4) Kontribusi pendapatan petani terbesar berasal dari nilai biodiesel dari biji <i>Calophyllum inophyllum</i> yang mencapai yang mencapai 68% dari total pendapatan. Perkiraan pendapatan bersih perusahaan HTR yang dapat diterima pada akhir daur pengelolaan (50 tahun) oleh masing-masing anggota kelompok (1 kelompok 159 orang), dengan luas ideal perusahaan ideal 1717.2 ha mencapai Rp. 724.008.070;90. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan surplus di sektor kehutanan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan PDRB dan peningkatan sarana prasarana pendukung bagi pembangunan wilayah.</p> <p>Kata kunci : Hutan Tanaman Rakyat, Manfaat ekonomi, Kabupaten Biak Nunfor</p>	<p>pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).</p> <p>Kata kunci: Hutan rakyat, Gunung Sawal, petani, informan kunci, insentif.</p>
<p>UDC (OSDCF) 630*923.4 (594.53) Dian Diniyati & San Afri Awang</p> <p>Kebijakan Penentuan Bentuk Insentif Pengembangan Hutan Rakyat di Wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan Metoda AHP</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2, hal. 129 - 143</p> <p>Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>) dan metoda AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam</p>	<p>UDC (OSDCF) 630*911 (594.11) I. Samsodin, A. Wijaya & H. Sukiman</p> <p>Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur</p> <p>Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2, hal. 145 - 168</p> <p>Keberadaan masyarakat tradisional di Kalimantan diantaranya masyarakat Dayak sangat berperan dalam melestarikan sumberdaya hutan melalui kehidupan sosial dan adat istiadatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kampung Batu Majang dan Rukun Damai yang merupakan perkampungan suku Daya Kenyah sub-suku Kenyah Uma Baka dan Uma Tukung serta sub-suku Dayak Kenyah Leppo Tau di kampung Rukun Damai, aspek pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh suku Dayak Kenyah terlihat dari pola pengelolaan lahan yang merupakan bagian dari pola tata ruang. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai habitat flora dan fauna yang dimanfaatkan, terdiri dari areal kampung, daerah bekas kampung yang ditinggalkan, sungai, rawa, kebun, ladang dan hutan (sekunder muda, sekunder tua dan hutan primer). Fungsi dari kawasan tersebut adalah sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkebunan dan sebagai kawasan budaya tradisional. Lahan cadangan digunakan untuk produksi hasil hutan non-kayu dan kawasan hutan sebagai lahan konservasi dan pemanfaatan tradisional. Ketahanan sistem sosial adat tradisional masyarakat Dayak telah terbukti perannya dalam pelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di bagian hulu.</p> <p>Kata kunci: Tata ruang, pengelolaan lahan, sumberdaya alam, Dayak Kenyah</p>

JOURNAL OF FORESTRY POLICY ANALYSIS

ISSN: 0216 - 0897

Date of issue : August 2010

The descriptors given are keywords. The abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC (OSDCF) 630*114.444 (594.47)
Edwin Martin & Bondan Winarno
The Role of Stakeholders in Peat Land Utilization; Case Study at Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra
Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 2, p. 81 - 95

Tree based peat land rehabilitation is still rare effort either from its program and its succes. This research aims to answer general question on how tree based peat land rehabilitation could be supported by stakeholders, through case study at Ogan Komering Ilir Regency. Stakeholder analysis and institutional assessment were employed to select and assess proper actors and institutional factors enabled collective action on dealing with peat land. High social acceptance on commodity or bussiness type as well as its bussiness feasibility were identified as main factors that should be considered for enabling collective action on future tree based peat land rehabilitation program at Ogan Komering Ilir.

Keywords: Peat land rehabilitation, enabling incentives, collective action

humans and other living creatures. Lende Ura concept encourage people to value each component of the existing natural resources, and influence either directly or indirectly to the process of rain. Therefore, people do not do illegal logging, forest fires and avoiding the land, preserve water catchment areas through the cultivation of dryland mixed farming and use non-timber forest products.

Keywords: Lende ura, local initiatives, rehabilitation, soil and water conservation, kaliwu.

UDC (OSDCF) 630*907.32 (594.71)
Gerson ND. Njurumana & Budiyanto Dwi Prasetyo
Lende Ura, an Initiative in the Community Rehabilitation of Forest and Land Resources in Sumba Barat Daya
Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 2, p. 97 - 110

Local communities have a strategic role in supporting the activities of forest and land rehabilitation. Various patterns of local adaptation to the environment is one resource that needs to get attention in the planning of sustainable forestry development. Human beings can not be separated from the environment, human and otherwise is a product of environment, so that various forms of adaptation to the environment encountered by the perceptions and experiences interact in the management and utilization of forest resources, soil and water. Local initiatives on the philosophical and practical level, is actually the basic capital for development. This research is study of local initiatives that Lende Ura on the Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Research using a descriptive approach through literature and documentation and in-depth interviews that related to the focus conducted Studies. Research was done in 2009. Data analysis carried out descriptive narrative. Lende Ura is one form of local initiatives is a philosophy of community life in Sumba Barat Daya who view the forest as a bridge for the coming rain. People to understand that forests are well maintained will be a bridge for the rain that they support agriculture and water availability for

UDC (OSDCF) 630*923.4 (594.81)
Irma Yeni & Sandbi Imam Maulana
Prospect of Community Forest Development in Biak Nunfor Regency, Papua
Journal of Forestry Policy Analysis Vol. 7 No. 2, p. 111 - 128

The development of community forest, hopefully will convert critical land to be productive stage by stage and also increasing the wealth of the people. One of the factors that causing the slow-moving of community forest development is the lack of people's interest. Hence, to support both of peoples and investors interest in developing community forest, some measures are required, such as Program socializations at community level, to increase effectivity; law assurance of land status; the information including both of technical and financial exertion feasibility; the teaching on community institution. Thoughtful analyses on management system and economic benefit corresponding to development region are also required.

This research aims to dig up the information in community forest management system that can be developed in Biak Nunfor Regency, and also the economic benefits correspond to the existence of community forest. This research took a place through quantitative descriptive method based on survey technique. The development prospect of community forest was calculated based on financial aspect and the contribution of community forest to farmers income. The calculation of financial aspect was took a place in KTH Insumarires, East Biak District as an example. Which were Land Expectation Value (LEV) calculated based on Faustman formula, and financial feasibility based on Net Present Value, Benefit Cost Ratio (Perkins, 1994), Internal Rate of Return.

This research reveals that 1) if 10% of production forest in Biak Nunfor Regency is unproductive forest, so there will be at least 7.477,8 ha potential land available to develop community forest, with Calophyllum inophyllum as the prominent species by practising THPB silviculture system; 2) The exertion of community forest is feasible to conduct in 50 years exertion cycle with 5% discount rate; 3) The high rate of labour work time requirement (5.724 HOK), opening the opportunity of job vacancy and increasing farmer's income whose involved in corresponding activities; 4) The biggest farmer's income contribution are come from biodiesel value of Calophyllum inophyllum seeds that reach at least 68% from total income. The

**PERAN PARAPIHAK DALAM PEMANFAATAN LAHAN
GAMBUT; STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR, SUMATERA SELATAN**
*The Role of Stakeholders in Peat Land Utilization; Case Study at
Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra*

Oleh/By :

Edwin Martin & Bondan Winarno¹

¹Balai Penelitian Kehutanan Palembang
Jl. Kolonel Burlian Km. 6,5 Puntir Kayu, Palembang
Telp. 0711 414864 Fax. 0711 414864
email: abinuha[^]876yahoo.co.id

ABSTRACT

Tree based peat land rehabilitation is still rare effort either from its program and its succes. This research aims to answer general question on how tree based peat land rehabilitation could be supported by stakeholders, through case study at Ogan Komering Ilir Regency. Stakeholder analysis and institutional assessment were employed to select and assess proper actors and institutional factors enabled collective action on dealing with peat land. High social acceptance on commodity or bussiness type as well as its bussiness feasibility were identified as main factors that should be considered for enabling collective action on future tree based peat land rehabilitation program at Ogan Komering Ilir.

Keywords: Peat land rehabilitation, enabling incentives, collective action

ABSTRAK

Rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak, melalui studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Analisis stakeholder dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mendukung aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut digunakan sebagai metode dalam mencari pemungkin terjadinya dukungan parapihak terhadap upaya rehabilitasi. Penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas sebuah jenis usaha adalah faktor pemungkin dominan yang layak diperhatikan agar terjadi aksi kolektif dalam program rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kata kunci: Rehabilitasi lahan gambut, insentif pemungkin, aksi kolektif

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis, yakni sekitar 21 juta hektar yang tersebar terutama di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Lahan gambut

¹Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Palembang, email: abinuha1976@yahoo.co.id

paling luas di Indonesia terdapat di Sumatera (Wahyunto *et al.*, 2005). Di Pulau Sumatera, penyebaran lahan gambut umumnya terdapat di sepanjang pantai timur, yaitu di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Lampung. Di Sumatera Selatan, lahan gambut terluas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yakni seluas 769 ribu hektar (Wahyunto *et al.*, 2005). Luas lahan rawa termasuk gambut dan danau di Kabupaten OKI mencapai sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya (Pembkab OKI dan PPMAL Unsri, 2006).

Sebagaimana kebanyakan lahan gambut di Indonesia, awalnya lahan gambut di OKI ditutupi oleh hutan rawa gambut yang unik, dengan jenis-jenis tumbuhan seperti Ramin, Jelutung, Kempas, Punak, Pulai, dan Meranti. Praktik pengusahaan hutan yang tidak berkelanjutan dan kebakaran hutan telah mengubah hutan gambut menjadi lahan alang-alang terbuka, semak belukar atau danau-danau kecil. Kini, sebagian besar lahan gambut tersebut telah sedang dalam proses menjadi kebun kelapa sawit (Zulfikhar, 2006; Lubis, 2006).

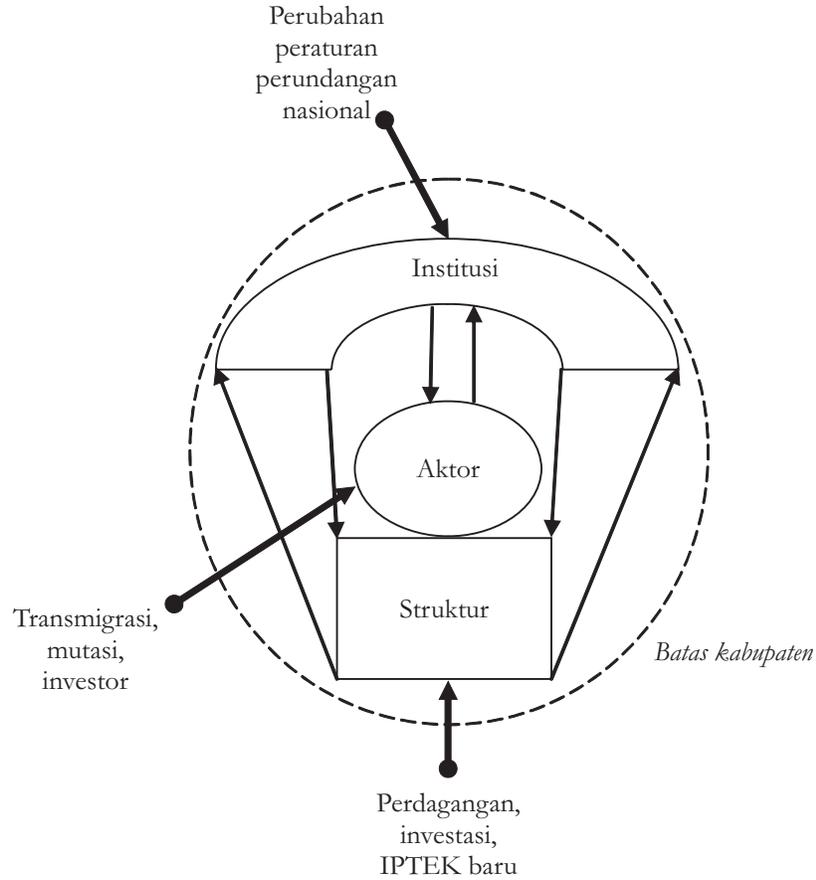
Rehabilitasi adalah kata kunci dari tesis yang dikemukakan banyak ahli rawa gambut untuk dapat memperbaiki lahan gambut yang telah rusak menuju keadaan atau fungsi semula. Sebagai contoh, Wibisono *et al.* (2005) dan Daryono (2006) merekomendasikan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis-jenis yang cocok untuk lahan gambut yang kondisinya telah terbuka, baik pada lahan dengan kedalaman gambut kurang dari tiga meter atau lebih. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon masih merupakan upaya yang langka, baik dari sisi program maupun keberhasilannya. Sampai dengan tahun 2008, upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten OKI tidak lebih dari 50 hektar dan cenderung hanya didukung oleh sektor kehutanan saja (Dinas Kehutanan Kabupaten OKI, 2008; hasil wawancara).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan umum tentang bagaimana menjadikan program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon dapat didukung oleh parapihak (*stakeholders*), melalui studi kasus di Kabupaten OKI. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang sebaiknya dilibatkan dan faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang layak diperhatikan sebagai pemungkin terjadinya dukungan parapihak (aksi kolektif) terhadap upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon.

II. BAHAN DAN METODE

2.1. Kerangka pikir, lokasi dan waktu penelitian

Kerangka pikir utama yang digunakan dalam mengkaji insentif pemungkin bagi terjadinya aksi kolektif rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten OKI ini adalah konsep SIA (*Structure, Institution, Actors*). Pendekatan SIA ini sangat berguna dalam menganalisis perubahan ekonomi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya (Sato, 2005). Struktur (S) dalam pendekatan SIA adalah arena tempat parapihak bermain/bertindak, Institusi (I) adalah aturan-aturan formal dan informal yang berlaku, dan Aktor (A) merupakan parapihak yang terlibat (Gambar 1).



Gambar 1. Pendekatan Structure, Institution dan Actors (SIA) (Sato, 2005; dimodifikasi)
Figure 1. Structure, Institution and Actors Method (Sato, 2005; modified)

Taraf analisis dalam penelitian ini adalah satu kabupaten dalam hal ini Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). *Structure, Institution* dan *Actors* dalam Kabupaten OKI dipengaruhi unsur-unsur di luar kabupaten. Perubahan peraturan perundangan nasional atau provinsi akan mempengaruhi I dalam kabupaten OKI. Karakteristik aktor-aktor yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut, baik jumlah maupun kapasitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti transmigrasi, mutasi atau penggantian pejabat, atau masuknya investor dari luar kabupaten. Struktur (*playing field*) dalam Kabupaten OKI dapat berubah apabila terjadi perubahan variabel perdagangan, investasi, maupun ditemukannya IPTEK baru.

Objek lahan gambut yang diangkat dalam penelitian adalah lahan gambut yang berada di luar kawasan hutan dan tidak berada dalam penguasaan perorangan. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis keterlibatan banyak pihak di Kabupaten OKI dalam pengaturan dan pemanfaatan lahan gambut tersebut. Selain itu, lahan gambut seluas

kurang lebih 585.425 Ha yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten OKI telah diusahakan oleh 3 (tiga) pemegang izin usaha hutan tanaman, yaitu PT. SBA Wood Industries, PT. Bumi Andalas Permai, PT. Bumi Mekar Hijau untuk ditanami *Acacia crassicarpa*. Izin konsesi hutan tanaman industri berada di luar kewenangan pemerintah daerah kabupaten OKI.

Elemen-elemen penyusun Struktur (S) dan Institusi (I) diperoleh dari hasil analisis faktor-faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang dianggap parapihak mendukung preferensi pemanfaatan lahan mereka, sedangkan para pihak yang terlibat (A) dapat diketahui melalui analisis stakeholder. Mengingat perkembangan dan sejarah pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI masih relatif baru (dimulai setelah tahun 2000-an), maka dilakukan komparasi terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar)², Provinsi Jambi yang telah memiliki sejarah pemanfaatan lahan gambut cukup lama (sejak era kolonial Belanda). Selain itu, komparasi ini akan meluaskan dimensi pilihan modus terjadinya aksi kolektif bagi rehabilitasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Bulan September 2008 hingga Januari 2009. Guna mendapatkan informasi langsung dari aktor-aktor yang dipilih oleh masing-masing institusi, waktu penelitian disesuaikan dengan kesediaan mereka untuk dapat melakukan wawancara tatap muka.

2.3. Metode pengumpulan dan analisis data

2.3.1. Stakeholder

Stakeholder atau parapihak adalah setiap individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh individu, kelompok, organisasi, atau institusi (Mitroff dan Linstone, 1993). Metode sampling bola salju (*snowball sampling*) digunakan untuk mendapatkan parapihak yang memiliki kepentingan dan atau pengaruh dalam pemanfaatan lahan gambut.

Metode ini dimulai dengan observasi di lapangan mengenai bentuk pemanfaatan lahan gambut yang paling umum ditemui, kemudian ditentukan siapa individu, kelompok, organisasi yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap individu atau wakil dari kelompok dan organisasi guna mendapatkan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak dalam pemanfaatan lahan gambut.

Nilai peubah kepentingan dan pengaruh parapihak didapatkan dari hasil total nilai pembobotan (*scoring*) pada masing-masing indikator peubah. Peubah kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak dijabarkan ke dalam 5 (lima) indikator, berupa jawaban atas pertanyaan terbuka. Jawaban aktor parapihak pada setiap indikator peubah diberi bobot (*scoring*) berdasarkan Skala Likert, yaitu nilai 1 (sangat lemah), 2 (lemah), 3 (sedang), 4 (kuat/tinggi), 5 (sangat kuat/tinggi), sehingga nilai tertinggi peubah baik kepentingan maupun pengaruh setiap pihak adalah 25.

²Dipilihnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi sebagai kabupaten pembanding adalah dengan pertimbangan kemiripan karakter lahan gambut (Wahyunto *et al.*, 2005) dan informasi awal tentang perbedaan modus pemanfaatan lahan gambut antara Kabupaten OKI dengan Tanjabar.

Tingkat kepentingan dan pengaruh parapihak ditampilkan dalam bentuk matrik, guna memetakan kepentingan dan pengaruh relatif dari parapihak kunci. Cara ini bermanfaat dalam memutuskan siapa yang semestinya dilibatkan, dikonsultasikan atau diinformasikan dalam sebuah aktifitas (Matsaert, 2002).

2.3.2. Faktor-faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi

Faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang mempengaruhi tindakan pemanfaatan lahan gambut didapatkan dari hasil evaluasi para pihak, melalui metode survei. Metode survei mengikuti pola metode sampling bola salju yang dilakukan untuk menentukan parapihak. Survei dilakukan dengan cara wawancara untuk pengisian kuesioner terstruktur.

Kuesioner dirancang berdasarkan modifikasi faktor-faktor kelembagaan kunci yang disebutkan dalam prinsip-prinsip perancangan kelembagaan lestari untuk rejim pengelolaan sumberdaya milik umum (*Design principals for robust Common Property Resources Regime*) yang disusun oleh Ostrom (1990) dalam Agrawal (2001), da Silva (2004), dan Quinn *et al.* (2007) dan faktor-faktor sosial ekonomi keberhasilan pengelolaan kehutanan masyarakat yang dibuat oleh Thomson dan Freudenberger (1997). Faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi ini berperan sebagai struktur atau arena dalam pemanfaatan lahan gambut.

Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Menurut Meinzen-Dick *et al.* (2004), analisis data secara kualitatif adalah sangat berguna untuk mengawali kajian tentang aksi kolektif, terutama pada saat manifestasi aksi kolektif dan parapihak kunci tidak dipahami. Berbeda dengan analisis data kuantitatif semacam analisis multivariate yang berusaha menentukan faktor-faktor utama yang berpengaruh, analisis kualitatif lebih fleksibel dan memberi ruang lebih luas bagi peneliti maupun pengambil kebijakan untuk menentukan peubah-peubah yang dianggap berpengaruh dalam aksi kolektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Identifikasi dan Pemetaan Parapihak

Hasil observasi lapangan di Kabupaten OKI menunjukkan bahwa bentuk umum pemanfaatan lahan gambut di areal bukan kawasan hutan adalah perkebunan kelapa sawit. Sementara, di Kabupaten Tanjabar sebagian besar lahan gambut dimanfaatkan dalam bentuk perkebunan campuran beragam komoditas (padi, palawija, pinang, kelapa, kopi rawa, pohon buah) yang dilakukan oleh masyarakat. Observasi lapangan ini menjadi dasar bagi identifikasi para pihak pada masing-masing kabupaten. Hasil inventarisasi menggunakan teknik *snowball* menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan gambut bervariasi antar kabupaten (Tabel 1).

Tabel 1. Parapihak dalam pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan dan Tanjabar, Jambi
Table 1. List of stakeholder for utilization of peatland in OKI Regency South Sumatra and Tanjabar, Jambi Province

No.	OKI	No.	Tanjabar
1.	Dinas Perkebunan (<i>Crop Estate Service</i>)	1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (<i>Plantation and Forest Service</i>)
2.	Dinas Kehutanan (<i>Forestry Service</i>)	2.	Kantor Lingkungan Hidup (<i>Environmental Service</i>)
3.	DPRD Kabupaten (<i>District House of Representative</i>)	3.	Bappeda (<i>Local Planning Agency</i>)
4.	Badan Lingkungan Hidup (<i>Environmental Agency</i>)	4.	DPRD Kabupaten (<i>District House of Representative</i>)
5.	Bappeda (<i>Planning Agency</i>)	5.	Dinas Perikanan dan Kelautan (<i>Ocean and Fisheries Service</i>)
6.	BPPMD (<i>Investment Agency</i>)	6.	Dinas Pertanian dan Peternakan (<i>Pasture and Agricultural Service</i>)
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan (<i>Ocean and Fisheries Service</i>)	7.	Desa Bram Hitam Kanan (<i>Bram Hitam Kanan Village</i>)
8.	Dinas Pertanian (<i>Agricultural Service</i>)		
9.	KODIM 0402 OKI (<i>District Military Service</i>)		
10.	BPPM (<i>Investment Agency</i>)		
11.	Dinas Peternakan (<i>Livestock Service</i>)		
12.	Disnakertrans (<i>Employment and Resettlement Service</i>)		
13.	PT. Gading Cempaka Graha		
14.	PPMAL Unsri		
15.	Desa Tanjung Beringin (<i>Tanjung Beringin Village</i>)		

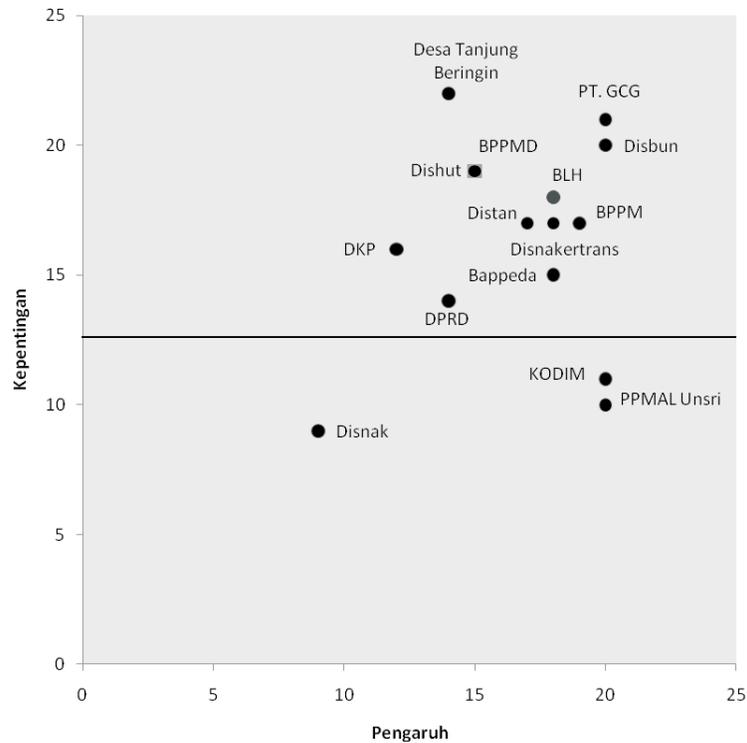
¹⁾Keterangan (*Remarks*): BPPMD = Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa²⁾, BPPM = Badan Perizinan dan Penanaman Modal³⁾, Disnakertrans = Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi⁴⁾, PPMAL Unsri = Pusat Penelitian Manajemen Air dan Lahan Universitas Sriwijaya⁵⁾

Pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI melibatkan lebih banyak parapihak dibandingkan dengan Kabupaten Tanjabar, Jambi. Ini dapat terjadi karena masyarakat di Tanjabar telah sejak lama (era kolonial Belanda) dan mampu mandiri dalam memanfaatkan lahan gambut. Sementara, lahan gambut di OKI mulai dimanfaatkan sejak adanya Program Transmigrasi Lahan Basah pada era tahun 1970-an namun tidak meluas (hanya untuk Kecamatan Air Sugihan). Pemanfaat lahan gambut di OKI bertambah banyak setelah masuknya investor untuk perkebunan kelapa sawit pada era tahun 2000-an.

Makin menyempitnya lahan kering yang dapat dimanfaatkan sebagai areal ekonomi produktif, mekanisme perizinan yang lokalitas, banyaknya kejadian kebakaran di areal lahan gambut, ketertinggalan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut adalah alasan-alasan yang mengundang keterlibatan banyak pihak, terutama sektor-sektor pemerintah daerah untuk turut andil dalam pemanfaatan lahan gambut di OKI. Biaya pemanfaatan lahan gambut yang relatif lebih mahal dibanding pengolahan lahan kering adalah alasan bagi pemerintah untuk membuka pintu bagi masuknya perusahaan swasta. Bagi perusahaan perkebunan, areal lahan gambut yang luas dan belum

dimanfaatkan adalah peluang untuk dapat menguasai lahan dalam skala luas.

Parapihak memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda dalam kasus pemanfaatan lahan gambut. Apabila tingkat pengaruh dan kepentingan dikombinasikan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk gambar matriks, maka dapat dilihat ilustrasi mengenai fenomena penelitian yang terjadi berkenaan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh untuk seluruh parapihak secara bersamaan (Gambar 2). Nilai pengaruh dan kepentingan didapatkan dari penjumlahan hasil pembobotan (*scoring*) menggunakan Skala Likert atas jawaban pihak atas 5 (lima) pertanyaan indikator pengaruh dan kepentingan. Matriks ini menggambarkan posisi masing-masing pihak dalam pemanfaatan lahan gambut.



Gambar 2. Matriks resultante hasil analisis parapihak Kabupaten OKI
Figure 2. Resultante matrix of analysis results of stakeholders in OKI regency

Posisi kuadran I (*Subjects*) pada Kabupaten OKI ditempati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kuadran ini menunjukkan bahwa DKP memiliki kepentingan yang tinggi namun pengaruhnya masih rendah. Bagi DKP lahan gambut merupakan alternatif untuk pengembangan sektor perikanan masa depan, namun kini belum ditemukan teknik budidaya yang tepat. DKP adalah sektor yang perlu diberdayakan dalam pemanfaatan lahan gambut masa mendatang.

Kuadran II (*players*) merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi. Kuadran II ditempati oleh 11 (sebelas) pihak. Banyaknya pihak yang berperan sebagai *players* adalah potensi besar dalam pemanfaatan lahan gambut. Ini berbeda dengan kasus pemanfaatan lahan gambut di Tanjabar, dimana *players* yang ada berjumlah 5 (lima) pihak saja dan masyarakat berada pada posisi pemanfaat yang kuat.

Kuadran III (*bystanders*) ditempati oleh Dinas Peternakan (Disnak). Disnak memiliki kepentingan dan pengaruh paling rendah karena menganggap lahan rawa gambut belum menjadi areal yang tepat untuk pengembangan peternakan. Ini dapat berimplikasi kurang diperhatikannya urusan peternakan jika pemanfaat gambut hendak mengembangkan peternakan.

Parapihak yang berperan sebagai unggulan *players* seperti Dinas Perkebunan (Disbun), Desa Tanjung Beringin, PT. Gading Cempaka Graha (GCG) dapat sangat berperan dalam membantu keberhasilan program lainnya di lahan gambut, misalnya Program Rehabilitasi. Mereka dapat dipastikan akan secara terus menerus berinteraksi dan memiliki kepedulian dengan lahan gambut.

Kuadran IV (*Actors*) ditempati oleh KODIM 0402 OKI dan PPMAL Unsri untuk kasus pemanfaatan gambut OKI. Mereka terbukti cukup berpengaruh dalam mengubah kebijakan dan keadaan lahan gambut di OKI. KODIM 0402 OKI pernah dapat mengkoordinasi banyak pihak untuk membantu mereka membuka areal gambut rawan terbakar menjadi areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat. Hasil studi PPMAL Unsri dijadikan panduan dalam pemanfaatan lahan gambut Kabupaten OKI. Kepentingan Program Rehabilitasi dapat bersinergi dengan pihak KODIM 0402 OKI dan PPMAL.

Parapihak yang teridentifikasi dan telah dipetakan di atas merupakan mereka yang secara langsung berperan dalam pemanfaatan lahan gambut. Namun demikian terdapat pula pihak lain yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi pemanfaatan lahan gambut secara temporer, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (DPUP). DPUP kurang berpengaruh dan tidak memiliki kepentingan dalam pilihan usaha di lahan gambut, namun dapat membantu pembukaan kanal (saluran air) yang diperlukan untuk usaha produktif di areal lahan gambut.

3.1.2. Faktor-faktor Kelembagaan dan Sosial Ekonomi

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh individu-individu pengambil keputusan setiap pihak menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara preferensi dengan fakta umum bentuk pemanfaatan lahan gambut yang kini ada (Tabel 2). Parapihak di OKI didominasi oleh mereka yang beranggapan bahwa kelapa sawit adalah jenis usaha yang paling tepat untuk dikembangkan di lahan gambut. Pemikiran ini sejalan dengan fakta lapangan yang ada saat ini bahwa sebagian besar lahan gambut yang dikuasai oleh negara telah dan akan diperuntukan bagi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, di Kabupaten Tanjabar perkebunan campuran³ yang banyak ditemui pada lahan-lahan gambut yang diusahakan masyarakat adalah juga menjadi preferensi dominan parapihak.

³ Perkebunan campuran atau kebun campuran adalah sebutan umum masyarakat untuk kebun yang ditanami dengan beragam komoditas, seperti pinang, kelapa dalam, kopi, dan lain-lain

Tabel 2. Perbandingan antara preferensi parapihak terhadap bentuk pemanfaatan lahan gambut dengan fakta umum di lapangan

Table 1. *Comparison between stakeholder reference on peatland utilization and the fact in the field*

Kabupaten OKI		Kabupaten Tanjabar	
Preferensi (n) (<i>Preference</i>)	Fakta umum (<i>General fact</i>)	Preferensi (n) (<i>Preference</i>)	Fakta umum (<i>General fact</i>)
Kelapa sawit (<i>Oil palm</i>) (33)	Kelapa sawit oleh perusahaan swasta (<i>Oil palm by big company</i>)	Perkebunan campuran (<i>Mixed plantation</i>) (16)	Perkebunan campuran oleh masyarakat (<i>Mixed plantation by community</i>)
Sawah (<i>Rice field</i>) (5)		Pertanian (<i>Agricultural</i>) (14)	
Pertanian non sawah (<i>Non rice agricultural</i>) (14)		Kehutanan (<i>Forestry</i>) (5)	
Kehutanan (<i>Forestry</i>) (9)		Perikanan (<i>Fisbery</i>) (3)	
Perkebunan lainnya (<i>Other crops estate</i>) (5)			

Keterangan: n = Jumlah aktor yang berpartisipasi dalam evaluasi pemanfaatan lahan gambut
(*Remarks: (n = Total actors participated in the evaluation of peatland utilization)*)

Manifestasi aksi kolektif dalam penelitian ini dilihat dari hubungan antara fakta lapangan dengan perspektif preferensi para aktor terhadap bentuk usaha yang paling diinginkan untuk lahan gambut. Dalam kasus Kabupaten OKI, usaha kebun kelapa sawit dapat disebut sebagai manifestasi aksi kolektif, karena terdapat hubungan antara fakta di lapangan dengan preferensi para aktor. Sementara itu, di aksi kolektif di Tanjabar menghasilkan perkebunan campuran.

Karakteristik-karakteristik kelembagaan dan sosial ekonomi yang dinilai oleh para aktor dianggap mempengaruhi keputusan dalam melakukan aksi pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI maupun Tanjabar ditampilkan dalam Tabel 3. Lebih dari 100 ribu hektar lahan gambut di Kabupaten OKI yang kini diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit oleh pihak perusahaan swasta tidak terlepas dari keberadaan faktor-faktor kelembagaan (institusi) yang mendukung dan stuktur sosial ekonomi yang sesuai dengan harapan parapihak.

Tabel 3. Hasil evaluasi faktor-faktor kelembagaan dan sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap keputusan pemilihan bentuk pemanfaatan lahan gambut
Table 3. Evaluation results of institutional and social economic factors that influence on choice decisions in peatland utilization

Faktor-faktor Sosial Ekonomi dan Kelembagaan yang berpengaruh (<i>Social-Economic and Influenced Institutional factors</i>)	Jumlah pihak yang mendukung (%) (<i>Total of body supported (%)</i>)	
	OKI (n = 33)	Tanjabar (n = 16)
Kemudahan proses perizinan	57,58	75
Kepuasan kinerja pola pemanfaatan	39,39	43,75
Anggapan kesesuaian lahan	78,79	68,75
Dukungan aturan	72,73	75
Kemudahan monitoring	63,64	75
Rendahnya resiko klaim lahan oleh pihak lain	69,70	75
Kemudahan membuat batas	84,85	75
Anggapan ramah lingkungan	69,70	43,75
Penerimaan sosial pilihan usaha	96,97	93,75
Kemudahan memobilisasi massa	57,58	50
Budaya bekerjasama	81,82	93,75
Keberadaan individu sebagai teladan	30,30	68,75
Kesesuaian dengan norma dan budaya	78,79	87,50
Dukungan tenaga kerja	90,91	87,50
Keberadaan pasar bagi produk akhir	66,25	81,25
Rendahnya biaya penguasaan teknologi	27,27	68,75

Dukungan birokrasi dalam pemerintahan Kabupaten OKI dan banyaknya pengusaha yang tertarik untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit di lahan Gambut OKI dimungkinkan oleh tingginya penerimaan sosial untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Parapihak mempercayai bahwa usaha kelapa sawit adalah sesuatu yang menguntungkan dan keterlibatan mereka untuk mendukung usaha tersebut diyakini tidak sia-sia. Ini terjadi pula untuk kasus perkebunan campuran yang dibuat oleh masyarakat di Kabupaten Tanjabar. Masyarakat meyakini bahwa komoditas maupun pola tanam yang mereka gunakan adalah yang terbaik untuk usaha di lahan gambut.

Faktor kelembagaan lainnya yang dipertimbangkan parapihak mempengaruhi tindakan mereka mendukung usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI adalah kemudahan membuat batas. Usaha perkebunan kelapa sawit di lahan gambut membutuhkan biaya cukup tinggi, terutama dalam hal penyiapan lahan berupa pembuatan saluran pembuangan air atau disebut kanal. Kanal utama biasanya berfungsi tidak hanya sebagai aliran keluar (outlet) bagi kanal-kanal sekunder namun berperan pula sebagai batas lahan usaha. Kanal-kanal ini karena dibuat dalam biaya cukup tinggi, maka dapat berfungsi sebagai penanda penguasaan lahan yang jelas. Dalam kasus pembuatan kebun campuran di Tanjung Jabung Barat, kanal-kanal dibuat secara gotong-royong oleh sekumpulan orang. Sekumpulan orang tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya

komunitas, misalnya sebuah dusun, yang membatasi komunitasnya dengan pihak lain melalui batas kanal (atau disebut parit).

Faktor sosial utama yang disebut parapihak berpengaruh dalam terbentuknya usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI adalah keberadaan budaya bekerjasama dan anggapan kesesuaian usaha dengan norma dan budaya setempat. Budaya bekerjasama antar elit birokrasi, pengusaha dan masyarakat lokal di Kabupaten OKI mendukung terbentuknya usaha-usaha perkebunan kelapa sawit saat ini. Budaya bekerjasama adalah disebut dominan oleh parapihak di Tanjabar, karena perkebunan campuran dibentuk oleh sekumpulan orang. Sekumpulan orang tersebut meskipun berbeda suku, seperti banjar, jawa, dan melayu, namun memiliki keinginan yang sama untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan usaha produktif.

Dukungan tenaga kerja adalah faktor ekonomi utama yang mendorong parapihak untuk mendukung terbentuknya usaha perkebunan kelapa sawit di OKI maupun usaha perkebunan campuran di Kabupaten Tanjabar. Bagi pengusaha, tersedianya tenaga kerja dari masyarakat yang tinggal di sekitar lahan usaha merupakan faktor ekonomi utama yang akan membantu skala usahanya. Bagi pemerintah daerah, usaha perkebunan kelapa sawit yang mensyaratkan keberadaan pola inti-plasma akan menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Keberadaan pasar bagi produk akhir adalah faktor ekonomi lain yang mempengaruhi pilihan pola pengusahaan lahan gambut di kedua kabupaten. Faktor ini lebih dipercaya oleh parapihak Tanjabar dibandingkan dengan oleh parapihak OKI. Masyarakat Tanjabar memanfaatkan lahan gambut menjadi perkebunan campuran dan pilihan komoditasnya karena didorong oleh faktor permintaan pasar (*demand driven*).

3.2. Pembahasan

Lahan gambut di Kabupaten OKI mengalami dinamika penutupan lahan. Pada era tahun 2000an, sebagian besar lahan gambut di Kabupaten OKI merupakan hamparan lahan bekas terbakar yang ditumbuhi oleh rumput, paku-pakuan, dan semak. Areal ini menjadi wilayah yang mengalami kebakaran berulang sehingga dianggap sebagai areal tidak bermanfaat dan sumber masalah. Berbagai kajian, diskusi dan usaha telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut sekaligus menekan resiko terjadinya kebakaran lahan. Pada tahun 2004 lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan produksi dimanfaatkan sebagai areal hutan tanaman industri (HTI). Pemanfaatan lahan gambut sebagai areal usaha produktif dianggap sebagai solusi untuk merehabilitasi lahan yang telah rusak. Hutan tanaman industri yang ada dalam kawasan hutan dianggap sebagai solusi upaya rehabilitasi. Perkebunan kepala sawit masih dianggap cara yang paling memungkinkan untuk memanfaatkan hamparan lahan gambut rentan terbakar ini. Upaya rehabilitasi melalui hanya penanaman pohon saja selain tidak bisa dilakukan dalam skala luas karena keterbatasan biaya juga seringkali gagal karena tidak terpelihara.

Atribut struktur arena, institusi, dan aktor yang kini melekat pada lahan gambut di Kabupaten OKI adalah gambaran tentang fakta lapangan saat ini. Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon akan efektif dan adaptif apabila menyesuaikan dengan atribut-atribut tersebut. Pendekatan ini menjadi berarti apabila tidak terjadi perubahan nyata pada

faktor-faktor di luar jangkauan kemampuan parapihak di OKI (misalnya perubahan peraturan perundangan nasional, ilmu pengetahuan baru, dan lainnya). Rehabilitasi lahan gambut berbasis penanam pohon akan menjadi eksklusif apabila tidak menyesuaikan dengan karakteristik dan cara berpikir parapihak.

Parapihak yang berperan sebagai *players* dan memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten OKI seperti Dinas Perkebunan dan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta memiliki potensi besar untuk dilibatkan dalam upaya rehabilitasi lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian ini, paling tidak terdapat tiga pintu masuk utama untuk kegiatan rehabilitasi berbasis pohon, yakni melalui jalur birokrasi terutama Dinas Perkebunan, perusahaan perkebunan swasta, dan masyarakat desa yang tinggal di sekitar lahan gambut.

Selama ini, upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon hanya melalui Dinas Kehutanan saja. Pelibatan masyarakat hanya sebatas tenaga kerja yang membantu pekerjaan di lapangan. Belajar dari pengalaman terbentuknya kebun campuran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pada dasarnya masyarakat dapat diandalkan untuk mengubah lahan gambut yang telah rusak menjadi tertanami dengan beragam jenis tumbuhan produktif.

Faktor-faktor utama yang layak diperhatikan sebagai pemungkin dilibatkannya banyak pihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon adalah penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas. Kedua faktor ini, tanpa harus mengabaikan faktor kelembagaan lainnya, dalam kasus pemanfaatan lahan gambut di OKI dapat mempengaruhi perilaku aktor atau menjadi insentif tidak langsung untuk melibatkan parapihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut.

Penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap sebuah usaha merupakan atribut yang melekat pada sebuah entitas sosial. Ini dapat diartikan pula bahwa usaha tersebut memiliki modal sosial (*social capital*) untuk berkembang dalam sebuah entitas sosial. Menurut Krishna (2007), modal sosial bersifat sebagai *stock*, peubah yang mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan peubah lainnya. Hasil Penelitian Krishna selama tujuh tahun di India menyingkapkan bahwa modal sosial dapat berubah karena usaha-usaha yang dilakukan oleh internal kelompok masyarakat. Organisasi-organisasi yang ada dalam kelompok masyarakat dan para pemimpinnya dapat membantu pertumbuhan modal sosial.

Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon selayaknya menempatkan faktor penerimaan sosial sebagai program awal aktivitas rehabilitasi. Apabila Kabupaten OKI diasumsikan sebagai entitas sosial, maka organisasi-organisasi internal yang ada dalam kabupaten harus diyakinkan terlebih dahulu tentang keberhasilan dan nilai manfaat program rehabilitasi. Dalam konteks kabupaten, bupati sebagai kepala daerah memegang peran penting dalam penerimaan sosial ini. Program yang disampaikan langsung secara terus menerus oleh seorang bupati akan mendorong aksi kolektif para pihak yang ada di bawahnya.

Kemudahan dalam membuat batas adalah faktor dominan lainnya yang disebut parapihak mempengaruhi tindakan mereka dalam mendukung terbentuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten OKI. Lahan gambut yang telah rusak terlihat sebagai hamparan luas rumput atau semak. Jika tanpa batas yang jelas, maka akan sulit membedakan batas-

batas penguasaan sumberdaya. Usaha perkebunan kelapa sawit yang mendahulukan pembuatan kanal-kanal air dianggap dapat membatasi areal penguasaan antarperusahaan atau antarindividu. Kanal tidak hanya dapat berperan sebagai batas fisik antarlahan namun batas hak antaraktivitas parapihak.

Batas-batas yang jelas (*clearly defined boundaries*) disebut oleh banyak pakar sebagai faktor kelembagaan utama menuju keberhasilan pengelolaan sumberdaya umum yang berkelanjutan (Agrawal, 2001). Batas-batas yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian tentang siapa yang akan mendapat keuntungan dan siapa yang harus mengeluarkan biaya (Gibson *et al.*, 2005). Kanal-kanal yang dibuat dalam kasus kebun kelapa sawit di OKI maupun kebun campuran di Tanjung Jabung Barat dapat mengurangi biaya-biaya untuk monitoring dan penegakan (*enforcement*) batas hak-hak penguasaan sumberdaya lahan gambut, baik oleh korporasi maupun individu.

Upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon untuk mengundang dukungan banyak pihak tidak bisa hanya dilakukan melalui aktivitas penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon saja, namun harus ada kejelasan tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat dari usaha itu dan siapa yang harus mengeluarkan biaya (termasuk tenaga kerja) guna mencapai kemanfaatan tersebut. Cara mudah dan cepat untuk beradaptasi dengan “batas-batas yang jelas” adalah dengan mengintroduksi program rehabilitasi ke dalam aktivitas yang telah dilakukan oleh para pihak, misalnya penanaman pohon-pohon rehabilitasi di antara barisan tanaman kelapa sawit, atau dengan mengenalkan budidaya tanaman pohon rehabilitasi multiguna kepada masyarakat pemanfaat lahan gambut.

Faktor sosial ekonomi dominan yang mempengaruhi keberhasilan aksi kolektif pemanfaatan lahan gambut merupakan atribut struktur arena atau penciri *playing field* semua aktivitas pemanfaatan lahan gambut, termasuk upaya rehabilitasi. Ini dapat menjadi dasar dalam pemilihan jenis-jenis pohon atau pola teknis kegiatan rehabilitasi.

Upaya pemanfaatan lahan gambut dangkal yang terdegradasi dengan rehabilitasi berbasis pohon dapat meningkatkan fungsi lingkungan dan pencegahan kebakaran. Introduksi beragam jenis pohon merupakan upaya memperkaya keragaman jenis dan meningkatkan nilai ekonomi lahan gambut sehingga mengurangi resiko terjadinya pembakaran lahan gambut dengan dalih pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Parapihak yang dapat berperan penting dalam aksi rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Dinas Perkebunan, Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Swasta, dan masyarakat desa-desa di sekitar lahan gambut. Parapihak ini adalah para pemain yang memiliki kepedulian dan akan terlibat secara terus menerus dalam aktivitas di lahan gambut luar kawasan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Faktor-faktor utama yang layak diperhatikan sebagai pemungkin dilibatkannya banyak pihak dalam upaya rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon adalah

penerimaan sosial yang tinggi terhadap suatu komoditas atau jenis usaha dan kemudahan dalam membuat batas.

3. Faktor sosial ekonomi seperti budaya bekerjasama, anggapan kesesuaian usaha dengan norma dan budaya setempat, dukungan tenaga kerja, dan keberadaan pasar bagi produk akhir komoditas yang diintroduksi adalah penciri utama arena aktivitas yang ada di lahan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.2. Saran

1. Parapihak yang telah teridentifikasi sebagai pemain utama dalam aktivitas pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penelitian ini layak untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, rapat-rapat pembahasan dalam rangka program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Langkah awal untuk melibatkan banyak pihak dalam program rehabilitasi lahan gambut berbasis pohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan keyakinan parapihak terhadap kemanfaatan, tingkat keberhasilan, kejelasan siapa mendapatkan apa dan memberikan apa dalam sebuah program jangka panjang menuju hasil akhir. Langkah praktis lanjutan yang layak dikerjakan adalah dengan mensinergiskan aktivitas rehabilitasi dengan usaha yang telah dilakukan parapihak di lahan gambut, misalnya membuat pola rehabilitasi berbasis pohon di antara tanaman kelapa sawit atau dalam petak-petak kanal yang telah dibuat parapihak.
3. Pemilihan jenis komoditas pohon untuk program rehabilitasi dan model aktivitasnya sebaiknya memperhatikan faktor sosial ekonomi dominan yang menjadi atribut arena aktivitas pemanfaatan lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. 2001. Common property institution and sustainable governance of resources. *World Development*, Vol. 29, No. 10, pp. 1649-1672.
- Da Silva, P.P. 2004. From common property to co-management: lessons from Brazil's first maritime extractive reserve. *Marine Policy*, Vol. 28, No. 4, pp. 419-428.
- Daryono, H. 2006. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut secara Bijaksana dalam Rangka Menjaga Kelestariannya. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
- Gibson, C.C., J.T. Williams and E. Ostrom. 2005. Local enforcement and better forests. *World development*, Vol. 33, No. 2, pp. 273-284.
- Krishna, A. 2007. How does social capital grow? A seven-year study of villages in India. *The Journal of Politics*, Vol.69, No. 4, pp. 941-956.

- Lubis, I.R. 2006. Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Dipandang dari Aspek Konservasi: Pengalaman Kegiatan CCFPI di Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.
- Matsaert, H. 2002. Institutional Analysis in Natural Resource Research. Socio-economic Methodologies for Natural Resources Research. Chatham, UK: Natural Resources Institute.
- Meinzen-Dick, R., M. DiGregorio and N. McCarthy. 2004. Methods for studying collective action in rural development. *Agricultural Systems*, Vol. 82, No. 3, pp. 197-214.
- Mitroff, I. and H. Linstone. 1993. The Unbounded Mind. New York: Oxford University Press.
- Pemkab OKI [Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir] dan PPMAL UNSRI [Pusat Penelitian Manajemen Air dan Lahan]. 2006. Laporan Akhir Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan dan Pengembangan Daerah Rawa Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kayu Agung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Quinn, C.H., M. Huby, H. Kiwasila and J.C. Lovett. Design principles and common pool resource management: An institutional approach to evaluating community management in semi-arid Tanzania. *Journal of Environmental Management*, Vol. 84, pp. 100-113.
- Sato, G. 2005. Forestry Sector Reform and Distributional Change of Natural Resource Rent in Indonesia. *Journal of Developing Economics*, Vol. XLIII, No. 1, pp. 149-170.
- Thomson J.T. and K.S. Freudenberger. 1997. Crafting Institutional Arrangements for Community Forestry. Forests, Trees and People, Community Forestry Field Manual 7. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Wahyunto, S. Ritung, Suparto dan H. Subagjo. 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
- Wibisono, I.T.C., L. Siboro, dan I.N.N. Suryadiputra. 2005. Panduan Rehabilitasi dan Teknik Silvikultur di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International-IP.
- Zulfikhar. 2006. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Rawa Gambut dengan Pola KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Pengelolaan Hutan dan Lahan Rawa secara Bijaksana dan Terpadu. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman.

**KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF
PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT
DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS
DENGAN METODA AHP¹**
*(Policy to Determine Incentived form for Developing Privately
Owned Forest in Gunung Sawal, Ciamis
District with AHP Method)*

Oleh/By :

Dian Diniyati² & San Afri Awang³

Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

Jl. Raya Ciamis Banjar Km 4 dsn Pamalayan Ciamis

No. telp. 081546815496 Alamat e-mail dian_diniyati@yahoo.com

ABSTRACT

Forest area in Gunung Sawal was divided into several classifications, i.e. Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) managed by BKSDA Jawa Barat II, production forest managed by Perum Perhutani and privately owned forest managed by community. There was one ecosystem, influence to areas aside. anotherhand privately owned forests were continuously converted into other functions. To keep them settled need incentives. The purpose of the research was to find out the trigger factors in the changing of land utilization in privately owned forest and the forms of incentives fit to corresponding community socio-economics. The research was conducted in Sandingtaman village, Panjalu sub-district, Ciamis district from September to October 2008. Analytical Hierarchy Process (AHP) and in-depth interview techniques were implemented to collect data from key persons and farmers. Data collected, moreover, were descriptively analyzed. The result showed that socio-economic conditions influenced the farmer's decision in managing their privately owned forest. Incentives form elected were 9 and according to the key persons preferences, have selected 3 possessed of high score i.e. relevance and continuously extension on these following aspects i.e., technical, management, economic, social and culture (0.167), district government regulations which support land used establishment protecting environment and villagers welfare (0.140), fair regulations i.e. pro farmers regulation especially in arranging trade permissions related to wood species (0.126).

Keywords : Private owned forest, Gunung Sawal, farmer, key person, incentive.

ABSTRAK

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa

¹Tulisan merupakan bagian dari Tesis Dian Diniyati

²Peneliti Pada Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

³Guru Besar Pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan metoda AHP (*Analiitical Hierarchy Process*), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).

Kata kunci: Hutan rakyat, Gunung Sawal, petani, informan kunci, insentif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui, merupakan modal pembangunan yang jika dikelola secara benar akan memberi manfaat ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja dengan tetap menjaga manfaat lingkungannya. Sumber daya hutan Indonesia saat ini meliputi hutan produksi (66,35 juta ha), hutan lindung (33,5 juta ha), dan hutan konservasi (20,5 juta ha) dengan total luas mencapai 120,35 juta ha (Purnama, 2009).

Menurunnya kemampuan pasokan kayu dari hutan alam dan belum optimalnya hasil pembangunan hutan tanaman, menyebabkan hasil hutan dari hutan rakyat menjadi pilihan penting. Hutan di Kabupaten Ciamis, berdasarkan status kepemilikannya terdiri dari hutan negara dengan luas 35.007,88 ha dan hutan rakyat sekitar 27.945 ha. Produksi hutan rakyat rata-rata per tahun antara 300.000 s/d 400.000 m³, atau setara 4,9% dari jatah produksi tebangan (JPT) nasional dari hutan alam yang ditetapkan pemerintah yakni 8.152.250 m³ (Anonimous, 2009). Sementara produksi kayu dari hutan negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Ciamis tertinggi hanya mencapai 67.548,63 m³ (Dinas Kehutanan Ciamis, 2006). Tingginya potensi hutan rakyat di Ciamis tersebut mencerminkan tingginya manfaat ekonomi, sekaligus memberi gambaran tingginya potensi lapangan kerja yang juga bisa diciptakan, seperti industri pengolahan kayu berbasis kayu rakyat. Ini menunjukkan bahwa peran hutan rakyat mulai dirasakan penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan minat sebagian besar masyarakat mengembangkan tanaman sengon secara swadaya, serta makin banyaknya industri penggergajian. Dibuktikan dengan meningkatnya minat menanam dari tahun 2006 sebanyak 2.561.728 batang menjadi 6.304.920 batang pada tahun 2007, sementara pemerintah hanya mampu menanam 415.000 batang pada tahun 2006 kemudian 873.492 batang pada tahun 2007 (Dinas Kehutanan Ciamis, 2006).

Pada sisi yang lain, perkembangan hutan rakyat menghadapi banyak kendala dan ancaman, diantaranya sangat sensitifnya usaha hutan rakyat terhadap pengaruh-pengaruh yang mengarah kepada konversi usaha lainnya, yang disebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman, usaha tani di luar sektor kehutanan dan kontinyuitas pengembangan hutan rakyat (Herawati, 2001). Di wilayah hutan Gunung Sawal, telah terjadi perubahan lahan

kebun/hutan rakyat menjadi penggunaan lain selama kurun waktu tujuh tahun (tahun 1996 - 2003) seluas 546,39 ha (78,056 ha/tahun). Perinciannya sebagai berikut: perubahan menjadi pemukiman seluas 271,35 ha dan menjadi pertanian lahan basah seluas 275,04 ha. Namun ternyata, terjadi konversi sebaliknya yaitu dari lahan sawah menjadi pertanian lahan kering yang cukup luas yakni 304,49 ha (Diniyati, *et al.* 2006). Perubahan lahan tersebut akan menurunkan nilai manfaat ekologi (pengatur tata air, pengendali erosi, peredam limpasan permukaan dan pengatur kesuburan tanah).

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai bentuk insentif yang efektif, yang diperuntukkan bagi kawasan hulu, terutama untuk petani pemilik hutan rakyat, sebagai bentuk kompensasi pengembangan hutan rakyat dengan prioritas menjaga fungsi ekologi dan fungsi ekonomi.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan.
2. Mendapatkan bentuk insentif pengembangan hutan rakyat yang sesuai dengan kondisi lingkungan agar dicapai kelestarian pendapatan dan kelestarian lingkungan.

II. BAHAN DAN METODA PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pelaksanaannya pada bulan September - November 2008.

2.2. Pengambilan Contoh Penelitian

Unit analisis yang dijadikan responden yaitu: 1) petani hutan rakyat anggota kelompok tani di Desa Sandingtaman. Dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*), sebanyak 34 orang, 2) Informan kunci (narasumber *Stakeholders*) dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), sebanyak 9 orang.

2.3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer meliputi data karakteristik petani hutan rakyat dan data preferensi terhadap bentuk insentif hutan rakyat. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data dan informasi mengenai kondisi hutan rakyat di Gunung Sawal dan kondisi Desa Sandingtaman, yang berasal dari laporan instansi pemerintahan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

2.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Dilakukan secara terbuka dan terstruktur, tujuannya supaya dapat diperoleh informasi yang lengkap. Teknik wawancara secara terstruktur menggunakan panduan

pertanyaan dan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Data preferensi *stakeholders* dikumpulkan dengan teknik AHP. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*literature review*).

2.5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah dalam bentuk tabulasi atau gambar, sedangkan data bentuk insentif hutan rakyat, digunakan perangkat lunak *expert choise 9.0*, sehingga dihasilkan bobot prioritas pada setiap bentuk insentif. Selanjutnya seluruh data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik *deskriptif*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat

Kondisi sosial ekonomi petani hutan rakyat yang ada wilayah Gunung Sawal akan mencerminkan karakteristiknya, seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Petani Hutan Rakyat
Table 1. Farmer characteristics of privately owned forest

No	Karakteristik petani (<i>Farmer characteristics</i>)	Jumlah (<i>Total</i>)	Persentase (<i>Percentage</i>)
1	Umur		
	a. 0 – 14	0	0
	b. 15 – 64	28	82,35
	c. 65 up	6	17,65
	Total	34	100
2	Jenis Pekerjaan		
	a. Tani	28	82,35
	b. Peternak ayam	3	8,83
	c. Aparat Desa	1	2,94
	d. Pedagang	1	2,94
	e. Pensiunan	1	2,94
	Total	34	100
3	Tingkat Pendidikan		
	a. Tidak sekolah	1	2,94
	b. SD tidak tamat	4	11,76
	c. SD tamat/ sederajat	24	70,59
	d. SMP/ sederajat	2	5,88
	e. SMA/ sederajat	3	8,83
	Total	34	100
4	Jumlah tanggungan keluarga (orang)		
	a. 0 – 2	22	64,71
	b. 3 – 5	12	35,29
	Total	34	100
5	Rataan pendapatan petani setiap tahun	Rp. 15.089.849,88	100
	Rataan pengeluaran petani setiap tahun	Rp. 8.485.519,41	100
	Saldo pendapatan	Rp. 6.604.330,47	100

Sumber (*Source*) : Analisis data primer, 2008 (*Primary data analysis, 2008*)

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa umur responden tergolong produktif (15 - 64 tahun) sebanyak 82,35%, lebih banyak dibandingkan dengan umur tidak produktif (lebih dari 65 tahun) sebanyak 17,65%. Ini menunjukkan bahwa petani hutan rakyat adalah orang yang berusia muda dan termasuk dalam kategori kelompok umur produktif. Pada usia ini biasanya orang akan lebih berkreatifitas dan banyak berkarya. Selain itu memperlihatkan juga bahwa kegiatan di bidang pertanian masih menarik minat masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden pekerjaan utamanya adalah sebagai tani ada 23 orang (67,65%). Dengan banyaknya minat tenaga produktif di pertanian dan kehutanan, menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja untuk sektor pertanian dan kehutanan masih banyak, seperti dikemukakan oleh Purwanto, *et al.* (2004) dan Awang, *et al.* (2007) bahwa tenaga kerja yang digunakan dan dimanfaatkan untuk hutan rakyat berasal dari dalam keluarga. Melimpahnya tenaga kerja, mengharuskan tersedianya lapangan pekerjaan, salah satunya adalah bidang pertanian dan kehutanan, dimana sektor ini tidak mensyaratkan adanya kualifikasi tertentu untuk melaksanakan kegiatan pertanian dan kehutanan.

Tingkat pendidikan petani Desa Sandingtaman rata-rata hanya tamat SD atau pernah sekolah di SD tapi tidak selesai (70,59%), tingkat pendidikan tertinggi adalah SMA/Sederajat (8,82%). Tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap pilihan dan peluang yang dapat diraihinya, sehingga mampu berkreatifitas dan berproduktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan hutan rakyat (Badan Pusat Stataistik Provinsi Jawa Barat, 2007).

Jumlah anggota rumah tangga yang masih menjadi tanggungan dikelompokkan menjadi jumlah tanggungan 2 orang (64,71%), dan jumlah tanggungan keluarga antara 3 sampai 5 orang (35,29%). Anggota keluarga ini merupakan sumber tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah lahan yang dimiliki petani (Purwanto, *et al.*, 2004; Awang, *et al.*, 2007). Jumlah tanggungan keluarga ini, berpengaruh terhadap keputusan usaha yang akan dijalankan, agar hasil usahanya dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Rata-rata total pendapatan petani setiap tahunnya adalah Rp. 14.969.880 dengan total pengeluaran petani setiap tahun adalah Rp. 8.485.519,41. Dengan demikian setiap tahun terdapat surplus pendapatan yaitu sebesar Rp. 6.604.330,47. Berarti bahwa total pendapatan lebih besar dari pada total pengeluaran konsumsi rumah tangga petani, dengan kata lain seluruh petani mampu memenuhi kebutuhannya dan bahkan terdapat kelebihan dari pendapatan tersebut, setelah digunakan untuk memenuhi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

3.2. Perubahan Penggunaan Lahan Hutan Rakyat

Hutan rakyat yang dimiliki oleh petani letaknya terpencar/tidak dalam satu hamparan, rata-rata petani memiliki 2,6 blok, dengan rata-rata luasan setiap blok adalah 21.906,64 m², dengan total luasnya 5669,89 m², seperti ditunjukkan oleh Tabel 2. Jarak lahan hutan rakyat dari rumah petani berkisar antara 0,01 km - 3 km. Kondisi jarak ini mempengaruhi kunjungan petani terhadap lahan hutan rakyatnya. Semakin jauh jaraknya, semakin jarang dikunjungi, sehingga lahan tersebut cenderung ditanami dengan jenis yang

sama, dan kurang variatif. Sebaliknya, untuk lahan yang berdekatan dengan rumah akan cenderung mudah mengalami perubahan fungsi, tergantung pada informasi terkait jenis tanaman yang diterima petani.

Tabel 2. Kepemilikan Lahan Responden
Table 2. Respondent Land Ownership

Jenis Penggunaan Lahan	Warisan		Beli		Sewa lahan		Garapan		Total Luas	
	(m ²)	(%)	(m ²)	(%)	(m ²)	(%)	(m ²)	%	(m ²)	%
Hutan Rakyat	1825,65	32,19	3844,24	70,54	0	0	0	0	5669,89	64,54
Sawah	867,18	40,02	1005,53	46,41	294,12	13,57	0	0	2166,83	24,67
Pekarangan dan Rumah	144,32	46,15	168,41	53,85	0	0	0	0	312,73	3,56
Kolam Ikan	49,21	20,55	190,24	79,45	0	0	0	0	239,45	2,73
Lainnya (PHBM dan lahan terlantar)	0	0	168,82	42,71	0	0	226,47	57,29	395,29	4,5
Total	2886,36	32,86	5377,24	61,21	294,12	3,35	226,47	2,58	8784,19	100

Sumber (*Source*) : Analisis data primer, 2008 (*Primary data analysis, 2008*)

Luas lahan untuk hutan rakyat menempati urutan pertama, kondisi ini memberikan peluang cukup besar untuk pengembangan hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Awang, *et al.* (2002) bahwa dengan adanya dukungan, yaitu ketersediaan lahan tegalan tanah kering cukup luas di Desa Ngaliyan, memberikan peluang untuk pengembangan hutan rakyat sengon. Namun kenyataannya, perkembangan hutan rakyat di Desa Sandingtaman mengalami stagnasi karena adanya perubahan fungsi lahan dan bencana alam.

Kenyataannya, telah terjadi perubahan lahan yang dimiliki responden mulai dari tahun 1983 - tahun 2007, dengan luas total sebesar 33.582 m² (3,3582 ha). Keterangan yang lebih lengkap disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perubahan Lahan Responden di Desa Sandingtaman Tahun 1983-2007
Table 3. Respondent Land Change at Sandingtaman Vilage in 1983 -2007

No	Total luas lahan yang berubah (m ²)	Fungsi awalnya	Berubah menjadi
1	9800	Hutan rakyat	Kebun cabe
2	7980	Hutan rakyat	Sawah
3	6540	Hutan rakyat	Kandang ayam
4	2220	Hutan rakyat	Rumah
5	1260	Hutan rakyat	Kolam ikan
6	420	Hutan rakyat	Pabrik heleran
7	2800	Kebun singkong, sayuran	Hutan rakyat
8	2562	Sawah	Hutan rakyat
Total	33582		

Sumber (Source) : Analisis data primer, 2008 (Primary data analysis, 2008)

Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui bahwa perubahan lahan yang paling banyak terjadi adalah dari lahan hutan rakyat menjadi lahan lainnya. Tersedianya teknologi tepat guna seperti tersedianya irigari (saluran air), memudahkan perubahan menjadi lahan pertanian (sawah) seluas 7980 m². Walaupun ada juga perubahan yang awalnya lahan persawahan, berubah menjadi lahan hutan rakyat seluas 2562 m², disebabkan air tidak dapat mengalir lagi ke lahan tersebut secara rutin.

Faktor lainnya adanya informasi budidaya tanaman yang lebih prospektif, dan keinginan meniru keberhasilan (*sukses story*) budidaya jenis tanaman tertentu yang telah dilakukan pihak lain, sehingga lahannya berubah menjadi kebun cabe seluas 9800 m², kandang ayam seluas 6540 m², kolam ikan seluas 1260 m² dan pabrik penggilingan padi (pabrik heleran) seluas 420 m². Perubahan menjadi perumahan seluas 2220 m² disebabkan tidak/belum memiliki rumah, juga karena adanya perpindahan lokasi perumahan, disebabkan bencana longsor pada tahun 1983 (Desa Sandingtaman, 2007).

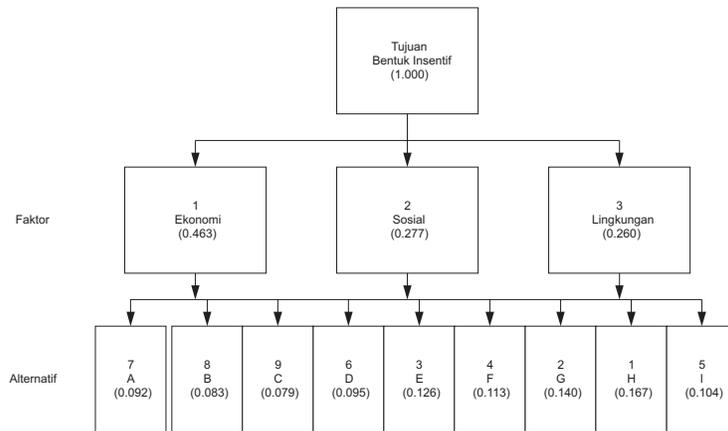
Faktor gangguan binatang seperti monyet, menyebabkan petani merubah lahan kebun singkong/sayuran menjadi hutan rakyat seluas 2800 m². Dengan demikian, menyusutnya luasan lahan hutan rakyat mayoritas disebabkan oleh tingginya tingkat kerawanan terhadap perubahan fungsi lahan, sebagai akibat tekanan ekonomi.

Terdapat pula beberapa luasan lahan hutan rakyat yang berpotensi (berpeluang) berubah menjadi peruntukan lainnya. Dari 34 responden yang memiliki hutan rakyat, hanya 8 orang (23,53%) tetap akan mempertahankan hutan rakyatnya. Sedangkan 26 responden (76,46%) menghendaki adanya perubahan pemanfaatan menjadi kegiatan lainnya. Responden yang menghendaki perubahan lahan (26 orang), sebanyak 22 orang (64,70%) yang menginginkan adanya perubahan pemanfaatan lahan hutan rakyat, menjadi lahan pertanian. Alasannya adalah tanaman pertanian dapat langsung dikonsumsi. Demikian juga dengan 3 orang responden (8,82%) yang menginginkan lahannya dijadikan sebagai kandang ayam, tetapi bagi 1 orang (2,94%) yang akan membangun rumah alasannya adalah supaya anaknya dapat memiliki rumah. Keinginan perubahan ini masih

sebatas potensi yang akan terwujud apabila berbagai kendala bisa diatasi. Kendala tersebut mencakup: aspek internal petani (faktor modal, tenaga kerja, teknologi, target waktu); dan aspek eksternal (faktor lingkungan). Adanya kendala tersebut memang membatasi pilihan, akan tetapi melalui perluasan pengetahuan dan ketrampilan, penggunaan peralatan, serta membangun aturan main berorganisasi sosial, maka kendala-kendala tersebut dapat diatasi (Hardjanto, 2000). Jika kendala tersebut berhasil diatasi, maka hutan rakyat akan banyak yang berubah fungsinya. Perubahan ini dalam konteks ekonomi, dapat dipandang sebagai upaya masyarakat untuk meningkatkan manfaat/nilai ekonomi lahan demi peningkatan kesejahteraannya. Perubahan lahan menjadi peruntukan lain juga terjadi di Ponorogo, Wonogiri, Boyolali dan Bangkalan, dimana masyarakat yang sudah mengembangkan hutan rakyat kembali mengusahakan lahannya untuk usahatani semusim (Donie, 1996 dan Indrawati, *et al.*, 1997 dalam Cahyono, *et al.*, 2005).

3.3. Bentuk Insentif Pengembangan Usaha Hutan Rakyat

Hasil analisis teknik AHP pemilihan bentuk insentif disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Hirarki Bentuk Insetif Hutan Rakyat
 Figure 1. Hierarchy Struktur for Incentived form of privately owned forest

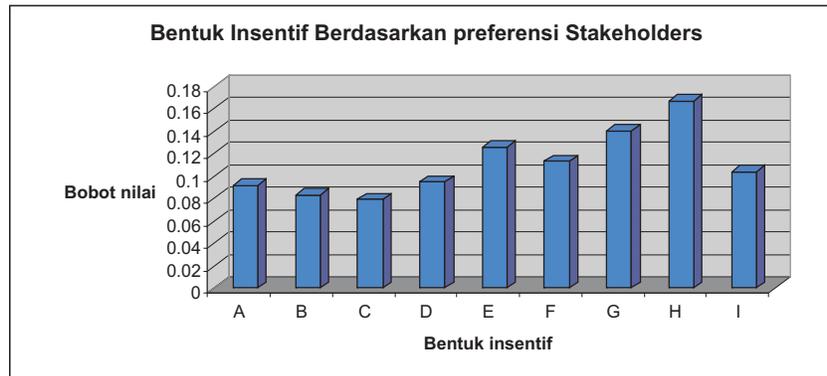
Keterangan:

- A. Bantuan berupa input pertanian yaitu: bibit yang berkualitas, upah tenaga kerja, modal
- B. Aksesibilitas terhadap lapangan pekerjaan
- C. Fasilitas kredit sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru (kredit usaha)
- D. Pelayanan sosial berupa sering dikunjungi oleh para pejabat sehingga petani merasa diperhatikan
- E. Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman.
- F. Inisiasi dari pemerintah untuk membentuk kelompok mandiri, sehingga nantinya mampu mengatur hutan rakyat dalam siklus tebang dan tanam
- G. Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa
- H. Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya
- I. Subsidi mengenai infrastruktur publik yang diperlukan

Berdasarkan jenis-jenis insentif terpilih, kemudian dilakukan analisis prioritas berdasarkan kepentingan relatif antar level dengan menggunakan *software expert choise 9,0 for window*. Prioritas *stakeholders* terhadap alternatif insentif yang ditawarkan diketahui pada tahapan wawancara dengan mempertimbangkan preferensi *stakeholders* terhadap faktor.

Hasil perhitungan bobot prioritas faktor memiliki rasio indeks konsistensi 0,0019 atau dibawah nilai batas rasio indeks konsistensi (0,10), hal ini berarti bahwa bobot nilai yang diberikan oleh *stakeholders* telah memenuhi syarat kekonsistenan. Dari bobot nilai yang diberikan tersebut memberikan hasil urutan prioritas faktor yaitu: pertama adalah Ekonomi, mendapatkan nilai bobot tertinggi sebesar 0,463, selanjutnya Sosial mendapatkan nilai bobot urutan ke dua dengan nilai 0,277, serta Lingkungan mendapat nilai bobot sebesar 0,260. Nilai bobot ini menunjukkan urutan prioritas dalam implementasinya.

Selanjutnya berdasarkan preferensi narasumber *stakeholders*, dilakukan penilaian terhadap 9 alternatif insentif, yaitu dengan mempertimbangkan pengaruh penerapan insentif terhadap faktor. Urutan pemilihan bentuk insentif yang dapat dilakukan di hutan rakyat, berdasarkan preferensi *stakeholders* mulai dari yang paling utama sampai yang terakhir seperti diperlihatkan oleh Gambar 2.



Gambar 2. Kurva Pemilihan bentuk insentif berdasarkan preferensi *stakeholders*
Figure 2. Curve of Insentive choices based on *stakeholders* preferences

Berdasarkan urutan prioritas bentuk insentif yang dikehendaki oleh narasumber *stakeholders*, ternyata bentuk insentif yang mungkin diterapkan di Gunung Sawal adalah termasuk dalam insentif tidak langsung, dengan kondisi pemungkin (*enabling condition*) (Wijayanto, 2007). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka prioritas insentif yang diperlukan petani hutan rakyat di Gunung Sawal yang paling utama adalah perbaikan prakondisi (insentif tidak langsung), supaya nantinya bentuk insentif langsung dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu bantuan yang lebih dibutuhkan adalah berupa insentif tidak langsung baik itu dari pihak pemerintah ataupun pihak lainnya, yang dapat mendorong

pengembangan usaha hutan rakyat dan memungkinkan tumbuhnya inovasi (daya kreativitas) untuk perluasan pengusahaan hutan rakyat.

Pada bahasan kali ini akan difokuskan hanya pada tiga urutan prioritas insentif yang memiliki nilai bobot gabungan tertinggi dan menjadi prioritas, yaitu:

1. Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik mengenai aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167). Diharapkan dengan adanya penyuluhan, maka akan terjadi transfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan, tentang usaha-usaha pertanian/kehutanan yang akan dilaksanakannya, sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan pemeliharaan fungsi ekologisnya. Insentif ini sesuai dengan karakteristik responden yang kebanyakan memiliki tingkat pendidikan tamat SD, sehingga masih memerlukan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tani. Melalui penyuluhan, petani diharapkan akan mampu melakukan pengelolaan hutan rakyat yang mengarah pada peningkatan mutu tegakan dan meningkatkan daya kreativitas yang akhirnya mampu meningkatkan nilai finansial tegakannya.
2. Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa (0,140). Insentif ini sesuai dengan kondisi Desa Sandingtaman yang rawan bencana, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk membantu masyarakat, menentukan lokasi yang dapat dijadikan sebagai wilayah perumahan dan wilayah budidaya, sehingga petani terbantu dan mampu menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan daya dukung tanah (*carrying capacity*) dan kondisi biofisiknya, serta diperoleh hasil yang optimal.
3. Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang tidak diskriminatif, lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126). Untuk menjaga kelestarian hutan rakyat di sekitar Gunung Sawal, petani mengharapkan adanya peraturan pemerintah mengenai perizinan tata niaga kayu.

Jenis kayu yang dihasilkan petani cukup bervariasi, sebagian ada yang jenisnya sama dengan kayu yang di tanam atau dihasilkan dari kawasan. Jenis tanaman hutan yang ada di Desa Sandingtaman diantaranya adalah puspa (*Schima wallicii*), manglid (*Maglieta glauca*), kamper (*Dryobalanops* sp.), rasamala (*Altingia excelsa*), afrika (*Meisopsis eminii*), tisuk (*Hibiscus macrophyllus*), bambu (*Bambusa* sp.) dan lain-lain. Tanaman dominannya adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan mahoni (*Swietenia macrophylla*). Selain itu, letak hutan rakyat berdekatan/berbatasan dengan kawasan hutan negara. Untuk itu, peraturan atau kebijakan yang efisien dan bisa melindungi hak-hak petani secara berkeadilan sangat dibutuhkan.

Regulasi yang kondusif bisa lebih diartikan pada aspek aplikasi di lapangan. Pada saat ini masih terjadi praktek pelaksanaan peraturan di lapangan yang sangat beragam. Sebagian aparat masih menerapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang illegal logging pada tataniaga kayu rakyat. Kondisi masyarakat yang lemah pada aspek pendidikan memberi kontribusi pada lemahnya aspek penguasaan informasi, termasuk dalam hal pengetahuan terhadap peraturan yang bisa diterapkan pada penatausahaan kayu. Pada sisi lain, masih cukup banyak aparat terkait, terutama yang ada

di lapangan, belum memahami secara benar tentang jenis, perkembangan dan penerapan peraturan sesuai dengan kasusnya. Kedua kondisi tersebut menjadi “celah” bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mengambil keuntungan.

Berdasarkan Permenhut no P.33/Menhut-II/2007, jenis-jenis kayu dari hutan rakyat telah ditentukan dokumen yang sesuai. Untuk Kabupaten Ciamis, angkutan log mahoni harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dengan cap kr (Kayu Rakyat). Namun demikian karena jenis ini selain banyak dikembangkan masyarakat sekitar Gunung Sawal, juga banyak dikembangkan Perum Perhutani di kawasan yang sama (sekitar Gunung Sawal), maka pengawasan terhadap peredaran jenis ini menjadi lebih ketat, bahkan terkesan cenderung berlebihan karena sering menerapkan pembalakan liar. Secara psikologis, masyarakat merasa dicurigai seolah membawa kayu illegal jika peraturan tersebut yang selalu didahulukan. Akibatnya, jenis-jenis tertentu yang sama dengan jenis yang dikembangkan di hutan negara akan semakin dijauhi petani, dan akan semakin langka dipasar. Beberapa alasan terkait dengan kurang menariknya budidaya mahoni dari perspektif petani antara lain : 1) *barga per satuan waktunya rendah*, karena petani merasa menanam pohon mahoni perlu waktu tunggu yang sangat lama (sekitar 15 tahun), tetapi hasilnya dihargai murah oleh tengkulak dengan dalih tingginya biaya perizinan dan 2) *ada biaya tambahan*, karena pembeli kayu mahoni harus mengalokasikan sejumlah anggaran tambahan untuk memuluskan perjalanan kayu ke tempat tujuan. Namun dari perspektif tengkulak, usaha kayu mahoni masih menguntungkan mereka karena resiko seperti penambahan biaya-biaya lain di perjalanan mampu dialihkan pembebanannya ke petani, sehingga secara kumulatif harga kayu mahoni rakyat masih lebih murah dari Perum Perhutani. Dengan demikian, minat pasar untuk jenis mahoni masih cukup tinggi karena pembelian kayu ke petani masih berjalan terus lantaran tengkulak kayu masih menikmati keuntungan cukup tinggi. Jika tingginya permintaan pasar terhadap jenis ini tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan baku di petani, maka kekosongan (*gap*) pasar akan benar-benar memicu terjadinya pembalakan liar jenis mahoni.

Penyerahan kewenangan perizinan ke kepala desa (surat keterangan asal usul/ SKAU) juga belum berjalan mulus. Sebagian besar kepala desa sambil menunggu mendapat kesempatan pelatihan untuk memperoleh sertifikat penerbit SKAU, dilakukan bimbingan oleh aparat kehutanan dalam hal penerbitan SKAU. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak kepala desa yang tidak mengikuti proses *transfer of knowledge* tersebut, malahan cenderung banyak yang ingin terima jadi saja (tinggal tanda tangan dan terima komisi saja).

Oleh karena itu untuk menciptakan iklim usaha perkebunan rakyat, terutama yang terkait dengan jenis-jenis yang sama dengan yang dikembangkan di kawasan, pemerintah daerah Ciamis cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis harus lebih aktif dan lebih intensif, melakukan koordinasi dengan aparat (instansi) terkait, serta sosialisasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok-kelompok tani, untuk menumbuhkembangkan pemahaman yang seragam terhadap persepsi, interpretasi dan aplikasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dalam kaitannya dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 2005. Hal ini perlu dilakukan karena kecepatan perubahan (revisi) peraturan penata-usahaan kayu (rakyat), lebih cepat dari kecepatan

pemahaman dan aplikasinya oleh aparat (instansi terkait) di lapangan. Sebagai contoh peraturan tentang SKAU, telah mengalami revisi cukup intensif (kurang dari setahun telah berubah) yakni dari P. 51/Menhut-II/2006 ke P.62/Menhut-II/2006 dan terbaru adalah P.33/Menhut-II/2007, dimana terjadi perubahan jenis-jenis kayu yang cukup substansial. Jenis kelapa yang dulunya harus menggunakan dokumen SKAU, kini cukup menggunakan nota penjualan. Status komersial suatu jenis kayu sangat ditentukan oleh permintaan pasar dan ketersediaan jenis substitusi, artinya jenis-jenis kurang dikenal (*lesser known species*) bisa menjadi komersial, jika teknologi yang terkait jenis tersebut telah berkembang, dan ketersediaan jenis utama semakin berkurang. Oleh karena itu status komersial kayu rakyat di pasar sangat dinamis, dan status pemberlakuan peraturan yang terkait jenis juga sangat dinamis, sehingga cenderung akan sering mengalami perubahan. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, untuk lebih mengintensifkan koordinasi dan sosialisasi peraturan dalam rangka membangun komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang berkeadilan.

Pemberian insentif ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penerima insentif dan pihak yang memberikan insentif. Lebih jauh Wijayanto (2007) mengemukakan bahwa, insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus, yang umumnya berasal dari faktor eksternal (pemerintah, LSM, swasta dan lain-lain), yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk bertindak atau mengadopsi teknik dan metoda baru yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi.

Berdasarkan wawancara diketahui tujuan pemberian insentif adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial dan pendapatan bagi masyarakat, menjamin kelestarian lingkungan (ekologi), meningkatkan kualitas SDM dan sebagai ibadah supaya mendapat pahala dari Allah SWT. Melalui insentif tersebut, diharapkan dapat memacu kegiatan pengusaha hutan rakyat yang berdampak meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan petaninya, dengan tetap menjaga kelestarian hutan rakyat sehingga kondisi lingkungan terjaga. Sedangkan keuntungan bagi pemberi insentif, yaitu supaya kesejahteraan petani meningkat dan menjamin kelestarian lingkungan. Kesejahteraan petani meningkat dengan cara perekonomian petani semakin baik, salah satunya diakibatkan oleh adanya pendapatan dari kegiatan hutan rakyat. Jika pendapatan petani meningkat maka petani memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya beli, diantaranya dapat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prastowo (1995) dalam Cahyono, *et al.* (2005), bahwa pengembangan hutan rakyat sebagai sarana perbaikan lingkungan hidup (*environment*), dengan memperhatikan kesejahteraan pemiliknya (*prosperity*), dan keamanan serta keutuhan hutan (*security*).

Mekanisme pemberian insentif, yaitu dapat diberikan langsung ke petani tetapi harus melalui kelompok, serta harus disertai dengan adanya peraturan yang jelas, yaitu system monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik dan kontinyu untuk menjamin insentif tepat sasaran. Sebenarnya monitoring dan evaluasi ini dapat juga dilakukan oleh kelompok tani, namun sayangnya kelompok tani di Desa Sandingtaman ini sudah tidak aktif lagi, dan yang tersisa hanyalah nama kelompok saja. Sudah menjadi kebiasaan, kegiatan penyuluhan sering kali dilakukan melalui kelompok petani, dengan demikian maka keberadaan kelompok tani harus kembali diaktifkan. Pembentukan kelompok tani

akan memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pengembangan hutan rakyat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang berpotensi memicu terjadinya perubahan lahan hutan rakyat menjadi fungsi lainnya, antara lain perkembangan dan ketersediaan : a). teknologi tepat guna, b). informasi budidaya tanaman yang lebih prospektif, c). adanya keinginan meniru keberhasilan (*sukses story*) budidaya jenis tanaman tertentu yang telah dilakukan pihak lain, d). karakteristik petani pemilik hutan rakyat, dan e). kondisi *given* Desa Sandingtaman yang rawan bencana alam. Potensi perubahan fungsi lahan tersebut sebenarnya tidak akan terwujud jika kendala seperti : target waktu, teknologi, modal, tenaga kerja dan lingkungan, belum mendukung. Akan tetapi dengan tersedianya/perkembangan pengetahuan penggunaan peralatan, keterampilan, serta membangun aturan main berorganisasi sosial, maka kendala-kendala tersebut berpotensi untuk teratasi.
2. Berdasarkan analisis metoda AHP bentuk insentif yang sesuai dengan petani di wilayah Gunung Sawal adalah perbaikan prakondisi (insentif tidak langsung), untuk membenahi kondisi sosial masyarakat terlebih dahulu, supaya bentuk insentif langsung nantinya dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Mekanisme penyampaian insentif melalui kelompok tani.

4.2. Saran

1. Dalam rangka program pemberian insentif pengembangan hutan rakyat di wilayah Gunung Sawal, hasil penelitian ini dapat diadopsi oleh Dinas Kehutanan Ciamis, dengan catatan pada penyampaian program-program yang melibatkan masyarakat harus memperhatikan kondisi karakteristik masyarakat setempat.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya untuk menekan kecenderungan perubahan fungsi lahan dari hutan rakyat ke fungsi lainnya, dengan mengatasi penyebab utama perubahan tersebut. Salah satunya adalah tekanan ekonomi yang sangat mendesak yang mana saat ini tidak bisa dipenuhi dari hutan, tetapi dipahami bisa dipenuhi dari sektor lain seperti pertanian, peternakan, perikanan dan lain lain. Oleh karena itu, kebutuhan tersebut harus bisa dipenuhi dengan cara menambah ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih beragam, sehingga masyarakat bisa memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan arah pembangunan, dengan lebih memprioritaskan pembangunan sektor-sektor penggerak ekonomi di desa dan atau melakukan “urbanisasi desa”.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2009. Prospek Hutan Rakyat untuk Industri Perakayuan Nasional. Website <http://www.mediadata.co.id/Multi-Client-Studies/MCS-Indonesian-Edition>. Diakses tanggal 14 April 2009.
- Awang, S.A., W. Andayani, B. Himmah, W. T. Widayanti dan A. Affianto. 2002. Hutan Rakyat. Sosial Ekonomi dan Pemasaran. BPFE. Yogyakarta.
- Awang, S.A., E. B. Wiyono dan S. Sadiyo. 2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Banyumili Art Network, Sleman.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2007. Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2007. Kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Website http://www.bapedajabar.go.id/bapeda_design/docs/publikasi_data/20080409_141711.pdf. Diakses tanggal 13 April 2009.
- Cahyono, A.S., N.P. Nugroho dan N.A. Jariyah. 2005. Tinjauan Faktor Kelayakan, Keuntungan dan Kesenambungan Pada Pengembangan Hutan Rakyat. Info Sosial Ekonomi. Vol. 5 (2) tahun 2005. Puslit Sosek Dan Kebijakan Kehutanan. Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan, Bogor.
- Desa Sandingtaman. 2007. Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan. Tingkat Desa dan Kelurahan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Departemen Dalam Negeri.
- Diniyati, D., E. Fauziyah, T.Sulistiyawati, B. Achmad, A. Badrunasar, Suyarno, dan E. Mulyati. 2006. Kajian Sosial Ekonomi Budaya dan Jasa Hutan Lindung Di Suaka Margasatwa Gunung Sawal. Laporan Penelitian. Loka Litbang Hutan Moonson Ciamis. Tidak Diterbitkan.
- Dinas Kehutanan Ciamis. 2006. Buku masterplan pembangunan bidang kehutanan Kabupaten Ciamis Jawa Barat Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kehutanan Ciamis, Ciamis.
- Hardjanto. 2000. Beberapa Ciri Pengusahaan Hutan Rakyat di Jawa. Dalam : Hutan Rakyat Di Jawa Perannya dalam Perekonomian Desa. Penyunting Didik Suharjito. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM). Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Herawati, T. 2001. Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan dengan Kriteria Ganda dalam Penentuan Jenis Tanaman Hutan Rakyat. Contoh Kasus di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Thesis. Program Pascasarjana. IPB. Bogor. Tidak diterbitkan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005. Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Tanggal 18 Maret 2005.

- Peraturan Menteri Kehutanan. Nomor: P.33/Menhut-II/2007. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
- Purnama, B.M. 2009. Pembangunan Kehutanan Indonesia. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Bandung. Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Purwanto., S. E. Wati dan S. A. Cahyono. 2004. Kelembagaan untuk mendukung pengembangan hutan rakyat produktivitas tinggi. Prosiding Ekspose Terpadu Hasil Penelitian, Yogyakarta 11-12 Oktober 2004. Hal 53-65. Puslitbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta.
- Wijayanto, N. 2007. Insentif Pengusahaan Hutan Rakyat. Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Kayu Rakyat di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan (PUSLITSOSEK) Bogor, pada tanggal 3 Desember 2007.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH “JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN”

1. Judul, harus jelas dan menggambarkan isi tulisan, ringkas tidak lebih dari 2 baris, ditulis dengan Times New Roman font 14 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-30 halaman, 2 spasi, ukuran kertas A4 dan font ukuran huruf 12.
3. Nama penulis ditulis dibawah judul dan dicantumkan tanpa gelar, dicantumkan pula alamat instansi, No. Telp/faks serta alamat e-mail penulis (jika ada).
4. *Abstract/* Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, tidak lebih dari 200 kata, berisi intisari permasalahan secara menyeluruh, bersifat informatif mengenai hasil yang dicapai, diketik dengan font 10, spasi satu.
5. *Key words/* Kata kunci ditulis dibawah abstrak dan tidak lebih dari lima entri.
6. Tubuh naskah, diatur dalam Bab dan Sub bab secara konsisten sesuai dengan kebutuhan. Semua nomor ditulis rata dibatas kiri tulisan, seperti:
I, II, III, dst. untuk Bab
A, B, C, dst. untuk Sub Bab
1, 2, 3, dst. untuk Sub subbab
a, b, c, dst. untuk Sub sub subbab
7. Sistematis penulisan adalah sebagai berikut:
Judul : Bahasa Indonesia dan Inggris
Abstract : Bahasa Inggris
Abstrak : Bahasa Indonesia
I. Pendahuluan
II. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Bab-bab Tubuh Naskah} \end{array} \right\}$
III., dst.
Daftar Pustaka
Lampiran
8. Tabel, gambar, grafik dan sejenisnya diberi nomor, judul dan keterangan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
9. Daftar Pustaka merupakan referensi yang dirujuk dalam naskah dan disajikan secara alfabetik nama belakang penulis pertama. Pustaka yang dirujuk diusahakan terbitan paling lama sepuluh tahun terakhir. Pustaka dapat berasal antara lain dari buku, jurnal, prosiding dan internet, dengan contoh cara penulisan sebagai berikut:
 - Gidden, A. 1979. *Central Problems in Social Theory*. Macmillan. London.
 - Doornbos, M. and L. Gertsch. 1994. Sustainability, technology and corporate interest: resources strategies in India's modern diary sector. *Journal of Development Studies* 30(3):916-50.
 - Purnomo. 2004. Potensi dan peluang usaha perlebahan di Provinsi Riau. *Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Litbang Hasil Hutan*, tanggal 14 Desember 2004 di Bogor. Hlm. 133-141 Pusat Litbang Hasil Hutan. Bogor.
 - Agarwal, A. and S. Narain. 2000. *Community and water management : the key to environment regeneration and proverty allevation*. Website: <http://www.undp.org/seed/pei/publication/water.pdf>.

